

WHAT ARE THE FACTORS ENCOURAGE REGIONAL GOVERNMENT PERFORMANCE?

(Empirical Study on Regional Organization of Magelang District)

Apakah Faktor Pendorong Kinerja Pemerintah Daerah?

(Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Magelang)

Novia Arizka Setiyadi

Universitas Muhammadiyah Magelang

Email: noviaarizka14@gmail.com

Muji Mranani

Universitas Muhammadiyah Magelang

Anissa Hakim Purwantini

Universitas Muhammadiyah Magelang

ABSTRACT

The government is the largest public sector organization that is fully responsible for carrying out functional aspects effectively and efficiently so that good public and corporate governance can be realized. Based on the results of the accountability report on the performance of district / city government agencies issued by the PANRB Minister, the Magelang District Government is one of the districts that received the CC predicate from 2012 to 2016. The CC predicate (score 50-65) indicates the value of "adequate (adequate)" and still need a lot of improvement. This study aims to examine empirically and analyze the effect of budget feedback, budget evaluation, organizational commitment, financial accounting systems, and information technology on the performance of local governments. The population in this study is the Magelang District OPD. Samples were taken using purposive sampling technique. While the data that can be processed is 48 respondents. The results of this study indicate that budget feedback has a positive effect on the performance of local governments. While budget evaluation, organizational commitment, financial accounting systems, and information technology have no significant effect on the performance of local governments

Keywords: *Budget Feedback, Budget Evaluation, Organizational Commitment, Financial Accounting System, Information Technology, Local Government Performance*

ABSTRAKSI

Pemerintah merupakan organisasi sektor publik terbesar yang bertanggungjawab penuh dalam menjalankan aspek-aspek fungsional secara efektif dan efisien sehingga dapat terwujud good public and corporate governance. Berdasarkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten/kota yang dikeluarkan Menteri PANRB Pemerintah Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten yang memperoleh predikat CC dari tahun 2012 sampai 2016. Predikat CC (nilai 50-65) mengindikasikan nilai "Cukup (memadai)" dan masih perlu banyak perbaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh umpan balik anggaran, evaluasi anggaran, komitmen organisasi, sistem akuntansi keuangan, dan teknologi informasi terhadap kinerja pemerintah

daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah OPD Kabupaten Magelang. Sampel diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan data yang dapat diolah sebanyak 48 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa umpan balik anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan evaluasi anggaran, komitmen organisasi, sistem akuntansi keuangan, dan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kata kunci: Umpan Balik Anggaran, Evaluasi Anggaran, Komitmen Organisasi, Sistem Akuntansi Keuangan, Teknologi Informasi, Kinerja Pemerintah Daerah

A. PENDAHULUAN

Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 yang direvisi menjadi UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjadi dasar lahirnya otonomi daerah, menjadikan penggeseran sistem pemerintahan yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi. Pada era otonomi daerah, pemda diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola sumber-sumber keuangan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat (Olinda, 2015). Pemerintah bertanggungjawab penuh dalam menjalankan aspek-aspek fungsional secara efektif dan efisien sehingga dapat terwujud *good public and corporate governance* (Mardiasmo, 2009: 27).

Berdasarkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten/kota yang dikeluarkan Menteri PANRB Pemerintah Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten yang memperoleh predikat CC dari tahun 2012 sampai 2016. Predikat CC (nilai 50-65) mengindikasikan nilai “Cukup (memadai)” dan masih perlu banyak perbaikan. Bupati Magelang Zaenal Arifin menyatakan bahwa hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Kabupaten Magelang masih dijumpai kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan ketidakpatuhan Aparatur Pemerintah terhadap Perundang-undangan yang berlaku. (www.bpkp.go.id). Selanjutnya, Kabupaten Magelang tahun 2017 mengalami keterlambatan dalam penetapan APBD. Dalam rapat paripurna, puluhan Kades ikut memantau jalannya rapat untuk melihat perkembangan pembahasan APBD 2017 (radarjogja.co.id).

Setiap pemerintah daerah harus dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang benar-benar memahami dan melaksanakan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan yang telah ditetapkan. *Software* aplikasi digunakan untuk memudahkan pelaksanaan pembukuan. Oleh karena itu, SDM harus mampu dan mahir dalam mengoperasikan komputer serta memahami aplikasi prosedur penatausahaan keuangan daerah. Berdasarkan hal tersebut maka penatausahaan keuangan daerah mutlak diperlukan sumber daya manusia yang profesional di bidang teknologi informasi khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut sesuai dengan permendagri No. 13 Tahun 2006 yang telah direvisi dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan implementasi paradigma baru yang berorientasi pada prestasi kinerja diterapkan dalam penyusunan APBD, sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah (Damanik, 2017).

Penelitian ini penting dilakukan, karena pengelolaan keuangan dalam pembangunan baik di tingkat pusat ataupun tingkat daerah merupakan kunci dalam menunjang pelaksanaan pembangunan. Terdapat beberapa faktor yang dianggap sangat penting dan dapat mempengaruhi kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan organisasi dengan baik dan tepat. Namun dalam hal ini sering terdapat masalah yang dapat menghambat lajunya pembangunan, tetapi seperti yang kita ketahui hambatan justru sering dialami oleh daerah (Verasvera, 2016). Faktor teknologi informasi dan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan faktor penting

dalam menunjang kinerja pemerintah daerah. Semakin baik aparat pemerintah daerah dalam menguasai teknologi informasi dan pemahaman terhadap sistem akuntansi daerah, maka kinerja akan meningkat.

Penelitian tentang kinerja pemerintah daerah telah banyak dilakukan, namun masih terdapat ketidakkonsistenan hasil. Diantaranya adalah pengaruh umpan balik anggaran dan evaluasi anggaran (Istiyani 2009; Syurgawi, 2015; Nurlelahayati, 2017), komitmen organisasi (Nurlelahayati, 2017 dan Damanik, 2017; Mufarrohah, 2013) dan pengaruh teknologi informasi terhadap kinerja pemerintah daerah (Wijayanti, 2017; Damanik, 2017).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Nurlelahayati, dkk (2017) tentang pengaruh umpan balik anggaran, evaluasi anggaran, dan komitmen organisasi terhadap kinerja SKPD di kota Lhokseumawe. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, pertama adalah menambahkan dua variabel independen pada penelitian ini, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan dan Teknologi Informasi, alasan ditambahkan variabel Sistem Akuntansi Keuangan adalah karena dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah memerlukan suatu sistem akuntansi keuangan untuk pengelolaan dana dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan akan menghasilkan laporan keuangan yang baik, laporan keuangan yang baik merupakan salah satu indikator bahwa organisasi tersebut memiliki kinerja yang baik pula. Semakin baik sistem akuntansi keuangan yang diterapkan organisasi maka semakin baik pula kinerja organisasi (Damanik, 2017). Sedangkan Teknologi Informasi, ditambahkan karena dalam pemanfaatannya yang tepat didukung dengan keahlian personil yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja organisasi/perusahaan maupun kinerja individu yang bersangkutan (Oktari, 2010).

Perbedaan kedua, melakukan penelitian pada OPD Kabupaten Magelang karena dalam implementasi kinerja pemerintah di Kabupaten Magelang belum terealisasi dengan baik. Terbukti dengan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten/kota yang dikeluarkan Menteri PANRB yang menyatakan bahwa kabupaten Magelang memperoleh predikat CC dari tahun 2012 sampai 2016. Hal tersebut dimungkinkan adanya faktor yang mempengaruhi kinerja yang masih belum maksimal.

B. TINJAUAN PUSTAKA

8) *Umpan Balik Anggaran*

Umpan balik anggaran merupakan salah satu persyaratan yang cukup penting dalam proses pengendalian pelaksanaan suatu kegiatan untuk meningkatkan kinerja. Umpan balik pada kinerja, ketika disajikan dalam konstruktif dan obyektif terbukti cukup penting sebagai motivator dalam memberikan estimasi yang handal dalam proses penganggaran (Yuen, 2004). Umpan balik sangat penting untuk memberikan kesempatan target, sehingga aparat pemerintah dapat menentukan sendiri bagaimana mereka melakukan tugas. Seseorang aparat pemerintah akan melakukan kerjanya dengan baik apabila mereka memperoleh umpan balik yang sebanding dengan kerjanya untuk mencapai tujuan OPD.

H₁ : Umpan balik anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

9) *Evaluasi Anggaran*

Evaluasi anggaran adalah tindakan yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran ke departemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar untuk penilaian kinerja departemen (Kenis, 1979). Evaluasi anggaran dapat menjadi salah

satu cara untuk mengukur kinerja aparat pemerintah, evaluasi anggaran dapat menelusuri penyimpangan atas anggaran ke departemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar untuk penilaian kinerja departemen. Anggaran yang digunakan dalam evaluasi kinerja cenderung mempengaruhi perilaku, sikap, dan kinerja aparat pemerintah.

H₂ : Evaluasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

10) *Komitmen Organisasi*

Komitmen organisasi adalah sikap yang mencerminkan sejauhmana seorang individu mengenal dan terikat dengan organisasinya (Griffin, 2002). Komitmen merupakan faktor yang penting dalam organisasi, karena aparat pemerintah akan lebih cenderung memiliki tujuan jika mereka merasa mereka adalah bagian dari penciptaan tujuan tersebut. Seseorang yang memiliki komitmen tinggi kemungkinan akan melihat dirinya sebagai anggota sejati organisasi dan akan berdampak baik terhadap kerjanya. Sebaliknya, seseorang yang memiliki komitmen yang rendah lebih cenderung untuk melihat dirinya sebagai orang luar untuk mengekspresikan ketidakpuasan yang lebih besar menyangkut kondisi kerja, dan tidak ingin melihat dirinya sendiri menjadi anggota jangka panjang dari organisasi.

H₃ : Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

11) *Sistem Akuntansi Keuangan*

Sistem akuntansi keuangan daerah yaitu serangkaian secara sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah (Sukmana, 2009). Dengan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik dan terus dikembangkan, maka dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan.

H₄ : Sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

12) *Teknologi Informasi*

Teknologi informasi mengacu pada suatu item yang bermacam-macam dan kemampuan yang digunakan dalam pembuatan, penyimpanan, dan penyebaran data serta informasi (Simarmata, 2006). Teknologi informasi sangat mempengaruhi kinerja, dimana teknologi informasi diperlukan untuk mengolah data yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data yang akan menghasilkan data laporan mingguan, bulanan, triwulan serta laporan tahunan. Teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian individu aparat pemerintah yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja aparat pemerintah yang bersangkutan dengan wujud tercapainya tujuan OPD.

H₅ : Teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

C. METODA PENELITIAN

Data

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Aparat Pemerintah yang ada pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Magelang. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan metode non-probability yaitu purposive sampling yang menggunakan teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan yaitu (1) Kepala sub bagian keuangan, (2) staf pejabat penatausahaan keuangan dan staf akuntansi atau pembukuan, karena mereka dianggap mengetahui kebijakan organisasi, pengambil kebijakan, pelaksana dan bertanggungjawab terhadap kinerja keuangan pada OPD masing-masing.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Item-item pengukuran variabel dalam penelitian ini diadopsi dari penelitian sebelumnya. Semua variabel diukur menggunakan skala Likert 5 poin, dengan rincian sebagai berikut : (1) Sangat Tidak Setuju (STS); (2) Tidak Setuju (TS); (3) Netral (N); (4) Setuju (S) dan (5) Sangat Setuju (SS). Definisi operasional variabel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Konstruk	Pertanyaan	Definisi Operasional	Referensi
Umpan Balik Anggaran	7 item	Persepsi atas respon dari tujuan anggaran yang telah ditetapkan	Maryanti (2002), Munawar (2006)
Evaluasi Anggaran	7 item	Persepsi atas tindakan penelusuran penyimpangan atas anggaran dan digunakan sebagai dasar untuk penilaian kinerja.	Kenis (1979), Istiyani (2009)
Komitmen Organisasi	9 item	Persepsi atas sikap yang mencerminkan pegawai pemda mengenal dan terikat dengan organisasinya.	Mowday et al (1979), Ferdiani (2012)
Sistem Akuntansi Keuangan	10 item	Persepsi atas fungsi akuntansi sejak analisis sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah	Permadi (2013)
Teknologi Informasi	8 item	Persepsi atas penerapan teknologi seperti <i>software</i> , komputer dan internet di pemda	Hanin (2013)
Kinerja Pemerintah Daerah	5 item	Persepsi atas prestasi yang dapat dicapai oleh instansi pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.	Baron dan Greenberg, (1990), Yuliani

(2010)

Sumber: berbagai penelitian terdahulu

Data Analysis

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan sebagai teknik analisis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan gambaran jumlah kuesioner yang kembali dan perbandingan dengan kuesioner yang dikirim dengan menyajikan tabel yang berisi nilai maksimal, minimal, *mean* dan standar deviasi yang diperoleh dari hasil jawaban responden yang diterima. Selain itu juga memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian, seperti jenis kelamin, umur, jenjang pendidikan, tingkat jabatan, dan lama masa kerja (Ghozali, 2016: 19).

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Menurut Ghozali (2016: 52), uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Dalam menguji validitas instrumen kuisisioner penelitian ini menggunakan uji validitas dengan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA). CFA merupakan salah satu bentuk analisis faktor khususnya dalam penelitian sosial. Tujuan utamanya adalah untuk menguji apakah indikator-indikator yang sudah dikelompokkan berdasarkan variabel latennya konsisten berada dalam konstruksinya atau tidak.

Alat uji lain yang digunakan untuk mengukur tingkat interkorelasi antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah *Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO MSA). Nilai KMO bervariasi dari 0 sampai dengan 1. Nilai yang dikehendaki harus >0,50 untuk dapat dilakukan analisis faktor dan *cross loading* >0,50 untuk menentukan kevalidan dari setiap item pernyataan.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi hasil pengukuran dari kuesioner dalam penggunaan yang berulang. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan Cronbach Alpha dengan kriteria pengambilan keputusan sebagaimana dinyatakan oleh Ghozali (2016: 43), yaitu jika koefisien Cronbach Alpha > 0,7 maka pertanyaan dinyatakan andal. Sebaliknya, jika koefisien Cronbach Alpha < 0,7 maka pertanyaan dinyatakan tidak andal.

Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan tujuan untuk mengetahui apakah umpan balik anggaran (X1), evaluasi anggaran (X2), komitmen organisasi (X3), sistem akuntansi keuangan (X4), dan teknologi informasi (X5) berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah (Y). Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Kinerja Pemerintah Daerah} = \alpha + \beta_1 \text{Umpan Balik Anggaran} + \beta_2 \text{Evaluasi Anggaran} + \beta_3 \text{Komitmen Organisasi} + \beta_4 \text{Sistem Akuntansi Keuangan} + \beta_5 \text{Teknologi Informasi} + \varepsilon \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

KPD = Kinerja Pemerintah Daerah

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ = Koefisien regresi

UBA = Umpan Balik Anggaran

EA = Evaluasi Anggaran

KO = Komitmen Organisasi

SAK	= Sistem Akuntansi Keuangan
TI	= Teknologi Informasi
ε	= Kesalahan Estimasi (estimation errors)

Pengujian Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2) bertujuan untuk mengukur sejauh mana variabel bebas dapat menjelaskan variasi variabel terikat, baik secara parsial maupun simultan. Nilai koefisien determinasi ini adalah antara nol sampai dengan satu ($0 < R^2 < 1$). Menurut Ghazali (2016: 95), nilai R^2 yang kecil mengandung arti bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat sangat terbatas. Sebaliknya, nilai R^2 yang hampir mendekati satu mengandung arti bahwa variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen.

Uji F

Uji F digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktual. Uji F berfungsi untuk mengetahui apakah model yang digunakan fit atau tidak fit (Ghozali, 2016: 97). Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian yang menggunakan perbandingan antara F hitung dan F tabel. Tingkat signifikansi pada penelitian ini sebesar 5% dengan derajat pembilang (df_1) = k dan derajat kebebasan penyebut (df_2) = n-k-1 dengan n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel independen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan dengan kriteria: Jika F hitung > F tabel atau $p\text{ value} < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak atau H_a diterima, artinya model yang digunakan bagus (*fit*).

Uji t

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel terikat (Ghozali, 2016: 97). Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien regresi dengan t tabel sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Ketentuan menilai hasil nilai t tabel digunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan $df = n-1$ sebagai berikut:

1. Jika t hitung > t tabel atau $p\text{ value} < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak atau H_a diterima, artinya variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika t hitung < t tabel atau $p\text{ value} > \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima atau H_a tidak dapat diterima, artinya variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

D. HASIL PEMBAHASAN

Kuesioner yang dapat dikirim sebanyak 84 kuesioner, akan tetapi kuesioner yang dapat diolah sebanyak 48 responden atau sebesar 57,1% dari yang dikirim. Hasil penyebaran kuesioner secara ringkas akan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.
Sampel Penelitian dan Tingkat Pengembalian

Uraian	Jumlah
Kuesioner yang dikirim	84
Kuesioner yang tidak dikembalikan	(13)
Kuesioner yang dikembalikan	71
Kuesioner yang rusak	(23)
Jumlah kuesioner yang diolah	48
Tingkat pengembalian kuesioner yang dapat diolah	57,1%

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Statistik Deskriptif Responden

Tabel 3
Profil Responden

Keterangan	Kriteria	Jumlah	Prosentase
Jenis Kelamin	a. Laki-laki	19 orang	39,6%
	b. Perempuan	29 orang	60,4%
		48 orang	
Usia	a. 20-30 tahun	3 orang	6,2%
	b. 31-40 tahun	12 orang	25,0%
	c. >40 tahun	33 orang	68,8%
		48 orang	
Tingkat Pendidikan	a. SMA	7 orang	14,6%
	b. D3	7 orang	14,6%
	c. S1	28 orang	58,3%
	d. S2	6 orang	12,5%
		48 orang	
Jabatan	a. Kasubag Keuangan	7 orang	14,6%
	b. Bendahara Pengeluaran	2 orang	4,2%
	c. Bendahara Gaji	2 orang	4,2%
	d. Penata Laporan Keuangan	1 orang	2,1%
	e. Lain-lain	36 orang	75%
		48 orang	
Masa Kerja	a. 1-5 tahun	5 orang	
	b. 5-10 tahun	9 orang	10,4%
	c. >10 tahun	34 orang	18,8%
		48 orang	70,8%

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan pada Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden penelitian ini didominasi oleh perempuan (60,4%), usia sebagian besar berkisar lebih dari 40 tahun (68,8%) dengan tingkat pendidikan terakhir adalah S1 dan memiliki masa kerja lebih dari sepuluh tahun.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Tabel 4. Hasil Uji Validitas

Variabel	KMO and Bartlett's Test	Keterangan
KPD	0,678	Valid
UBA	0,735	Valid
EA	0,677	Valid
KO	0,838	Valid
SAK	0,812	Valid
TI	0,800	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Hasil *cross loading* yang terlihat pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai *loading factor* lebih besar dari 0,5 ($>0,5$) yang berarti tingkat validitas signifikan. Namun ada beberapa indikator yang tidak valid dikarenakan nilai *loading factor* $< 0,5$, diantaranya UBA4, UBA5, UBA7, EA1, dan EA4. Instrumen yang digunakan untuk analisis selanjutnya hanya instrumen yang valid. Sedangkan instrumen yang tidak valid dikeluarkan dan tidak digunakan untuk pengujian selanjutnya.

Uji Reliabilitas

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kinerja Pemerintah Daerah	0,857	Reliabel
Umpan balik anggaran	0,807	Reliabel
Evaluasi anggaran	0,796	Reliabel
Komitmen organisasi	0,925	Reliabel
Sistem akuntansi keuangan	0,946	Reliabel
Teknologi informasi	0,880	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Koefisien Regresi

Keterangan	<i>Unstandardized</i>		<i>Standardized</i>	t	Sig.
	<i>Coefficients</i>		<i>Coefficients</i>		
	B	<i>Std.Error</i>	Beta		
Konstanta	1,472	0,651		2,262	0,029
UBA	0,402	0,139	0,491	2,905	0,006
EA	0,111	0,075	0,191	1,468	0,150
KO	0,046	0,186	0,050	0,247	0,806
SAK	-0,091	0,146	-0,104	-0,621	0,538
TI	0,237	0,189	0,224	1,255	0,216

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

$$KPD = 1,472 + 0,402UBA + 0,111EA + 0,046KO - 0,091SAK + 0,237TI + e$$

Uji Hipotesis

Uji R² (Koefisien Determinasi)

Tabel 7. Uji R²

R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	Std.Error of the Estimate
0,616	0,379	0,306	0,40314

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan uji R square, besarnya Adjusted R Square adalah 0,306, yang berarti bahwa kemampuan variabel umpan balik anggaran, evaluasi anggaran, komitmen organisasi, sistem akuntansi keuangan, dan teknologi informasi dalam menjelaskan variasi kinerja pemerintah daerah sebesar 30,6%. Sedangkan 69,4% lainnya dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model penelitian ini.

Uji F

Tabel 8. Uji F

Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
4,174	5	0,835	5,137	0,001
6,826	42	0,163		
11,000	47			

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai p value < alpha ($0,00 < 0,05$) dan F hitung sebesar 5,137, sedangkan F tabel sebesar 2,44. Hasil tersebut menunjukkan bahwa F hitung 5,137 > F tabel 2,44 yang berarti bahwa model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah baik atau fit.

Uji t

Tabel 9. Uji Hipotesis

Variabel	t hitung	t tabel	Sig.	Keterangan
UBA	2,905	1,678	0,006	H1 diterima
EA	1,468	1,678	0,150	H2 tidak diterima
KO	0,247	1,678	0,806	H2 tidak diterima
SAK	-0,621	1,678	0,538	H2 tidak diterima
TI	1,255	1,678	0,216	H2 tidak diterima

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Pembahasan

Pengaruh Umpan Balik Anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil pengujian, menunjukkan bahwa umpan balik anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, sehingga H1 diterima. Artinya semakin tinggi umpan balik yang diperoleh pemerintah daerah Kabupaten Magelang, maka semakin tinggi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Sebaliknya, jika tidak terdapat umpan balik anggaran yang diperoleh pemerintah daerah Kabupaten Magelang maka akan menurunkan kinerja pemerintah daerah tersebut.

Tanggapan pegawai terhadap umpan balik berbeda-beda, bisa positif atau negatif. Di satu sisi pegawai dapat termotivasi untuk mengubah perilaku kerja mereka, di sisi lain jika pegawai merasa umpan balik tidak akurat atau tidak berguna dan tidak puas dengan hasil ini, mereka akan cenderung mengabaikan komentar dan tidak menggunakan saran yang mereka terima (Jawahar, 2010). Pegawai yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran pada OPD Kabupaten Magelang sebagian besar telah mendapat umpan balik sehubungan dengan prestasi tugas dalam pencapaian tujuan organisasi. Umpan balik yang diterima berupa pelayanan manajemen yang baik, fasilitas pendukung yang memadai, motivasi dari atasan, dan lainnya digunakan untuk mengevaluasi kinerja para pegawai hingga akhir siklus penyusunan anggaran.

Berdasarkan goal setting theory yang merupakan penekanan pada pentingnya hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan kinerja yang dihasilkan. Konsep dasarnya yaitu seseorang yang mampu memahami tujuan yang diharapkan oleh organisasi, maka

pemahaman tersebut akan mempengaruhi perilaku kerjanya. Umpan balik mampu mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, seorang aparat pemerintah akan melakukan kerjanya dengan baik apabila mereka memperoleh umpan balik yang sebanding dengan kerjanya untuk mencapai tujuan OPD.

Penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Nurlalahayati, dkk (2017) yang menunjukkan umpan balik anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja SKPD. Namun penelitian ini konsisten dengan penelitian Istiyani (2009) menunjukkan bahwa umpan balik anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Pengaruh Evaluasi Anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa evaluasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, sehingga H2 tidak diterima. Artinya evaluasi anggaran yang dilakukan oleh OPD Kabupaten Magelang tidak berdampak pada meningkatnya kinerja pemerintah daerah. Hal ini dapat terjadi karena dalam menyiapkan anggaran dilakukan evaluasi kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan, sedangkan pada saat pelaksanaan tidak dilakukan lagi evaluasi terhadap kegiatan sehingga membuat kinerja menjadi rendah.

Evaluasi anggaran merupakan hal penting yang bertujuan untuk menelusuri kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam suatu unit. Berdasarkan goal setting theory yang merupakan penekanan pada pentingnya hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan kinerja yang dihasilkan. Konsep dasarnya yaitu seseorang yang mampu memahami tujuan yang diharapkan oleh organisasi, maka pemahaman tersebut akan mempengaruhi perilaku kerjanya. Evaluasi anggaran dapat menjadi salah satu cara untuk mengukur kinerja aparat pemerintah, anggaran yang digunakan dalam evaluasi kinerja cenderung mempengaruhi perilaku, sikap, dan kinerja aparat pemerintah.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Nurlalahayati, dkk (2017) yang menunjukkan bahwa evaluasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja SKPD. Namun penelitian ini sejalan atau konsisten dengan penelitian Istiyani (2009), yang membuktikan bahwa evaluasi anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah.

Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, sehingga H3 tidak diterima. Artinya, komitmen yang dimiliki oleh pegawai pemerintah daerah Kabupaten Magelang tidak mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Hal tersebut bisa terjadi tidak hanya karena komitmen yang rendah sehingga menyebabkan penurunan kinerja. Bisa jadi komitmen yang dimiliki oleh para pegawai itu baik dan tinggi, namun budaya kerja yang mereka terapkan kurang baik, sehingga menyebabkan tidak tercapainya tujuan organisasi yang sudah dirancang oleh OPD tersebut.

Untuk itu, perlu adanya dukungan dan motivasi dari pihak pimpinan kepada para anggotanya agar dapat meningkatkan komitmen dan memperbaiki budaya kerja pada masing-masing individu yang berada pada OPD Kabupaten Magelang. Jika komitmen baik dan budaya kerja juga baik otomatis kinerja pemerintah juga akan meningkat.

Teori Motivasi McClelland (1993) menyatakan bahwa motivasi berbeda-beda, sesuai dengan kekuatan kebutuhan seseorang akan prestasi. Seseorang yang memiliki motivasi berprestasi tinggi pada umumnya lebih berhasil dalam menjalankan tugas dibandingkan dengan mereka yang memiliki motivasi berprestasi rendah. Komitmen yang tinggi dimiliki oleh pegawai yang memiliki motivasi tinggi, sedangkan mereka yang memiliki motivasi rendah cenderung memiliki komitmen yang rendah. Komitmen yang rendah dan budaya kerja yang kurang baik akan berdampak langsung terhadap penurunan prestasi kerja yang dimiliki.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Nurlalahayati, dkk (2017) yang menunjukkan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja SKPD. Namun penelitian ini sejalan atau konsisten dengan penelitian Mufarrohah (2013), yang membuktikan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, sehingga H4 tidak diterima. Artinya, ada atau tidaknya sistem akuntansi keuangan dalam pemerintahan Kabupaten Magelang, tidak mempengaruhi kinerja pemerintah daerah Kabupaten Magelang. Sistem akuntansi keuangan yang tidak sesuai dengan organisasi dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat bahwa penyelenggaraan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan.

Sistem akuntansi keuangan yang tidak berpengaruh terhadap kinerja dapat terjadi karena sistem yang selalu berubah-ubah sedangkan pemahaman sumber daya manusianya kurang, sehingga perubahan tidak dapat diterima dengan baik dan berdampak pada penurunan kinerja. Selain itu, sistematisasi dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis sampai dengan pelaporan keuangan kurang berjalan dengan baik.

Sistem akuntansi keuangan dapat ditingkatkan melalui informasi dan komunikasi yang baik dan pemantauan pimpinan yang optimal. Berdasarkan goal setting theory yang merupakan penekanan pada pentingnya hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan kinerja yang dihasilkan. Konsep dasarnya yaitu seseorang yang mampu memahami tujuan yang diharapkan oleh organisasi, maka pemahaman tersebut akan mempengaruhi perilaku kerjanya. Dengan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik dan terus dikembangkan, maka dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Damanik (2017) yang menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja SKPD.

Pengaruh Teknologi Informasi terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, sehingga H5 tidak diterima. Artinya, teknologi yang digunakan tidak mempengaruhi kinerja yang dicapai oleh pemerintah daerah Kabupaten Magelang. Hal tersebut dapat terjadi karena pada dasarnya teknologi informasi hanyalah sebuah alat yang tetap memerlukan peran manusia untuk

menjalankannya. Optimal atau tidaknya penggunaan teknologi informasi dalam penyelesaian pekerjaan bergantung pada kemampuan sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan program-program pendidikan dan pelatihan (Diklat) / bimbingan teknis (Bintek) kepada staf/pegawai pengelola keuangan pada masing-masing SKPD serta mempertimbangkan kesesuaian latar belakang pendidikan pegawai. Selain itu, teknologi informasi harus dimanfaatkan secara optimal dengan cara meningkatkan penerimaan dan kemampuan staf/pegawai pengelola keuangan terhadap penggunaan teknologi informasi (Damanik, 2017).

Teknologi informasi sangat mempengaruhi kinerja, dimana teknologi informasi diperlukan untuk mengolah data yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data yang akan menghasilkan data laporan mingguan, bulanan, triwulan serta laporan tahunan. Berdasarkan goal setting theory yang merupakan penekanan pada pentingnya hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan kinerja yang dihasilkan. Konsep dasarnya yaitu seseorang yang mampu memahami tujuan yang diharapkan oleh organisasi, maka pemahaman tersebut akan mempengaruhi perilaku kerjanya. Teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian individu aparat pemerintah yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja aparat pemerintah yang bersangkutan dengan wujud tercapainya tujuan OPD.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Damanik (2017) yang menunjukkan bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja SKPD. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Wijayanti, dkk (2017) menunjukkan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh umpan balik anggaran, evaluasi anggaran, komitmen organisasi, sistem akuntansi keuangan, dan teknologi informasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah OPD Kabupaten Magelang. Sampel diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan data yang dapat diolah sebanyak 48 responden. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Hasil uji R square menunjukkan besarnya Adjusted R Square adalah 0,306, yang berarti bahwa kemampuan variabel umpan balik anggaran, evaluasi anggaran, komitmen organisasi, sistem akuntansi keuangan, dan teknologi informasi dalam menjelaskan variasi kinerja pemerintah daerah sebesar 30,6%. Sedangkan lainnya dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model penelitian ini

Hasil uji t menunjukkan bahwa H1. Umpan balik anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan H2. Evaluasi anggaran, H3. Komitmen organisasi, H4. Sistem akuntansi keuangan, dan H5. Teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Keterbatasan

Hasil uji R square menunjukkan bahwa variabel umpan balik anggaran, evaluasi anggaran, komitmen organisasi, sistem akuntansi keuangan, dan teknologi informasi bernilai 0,306 (30,6%). Sedangkan sebanyak 69,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model penelitian ini. Hal ini berarti masih banyak faktor lain yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini hanya berfokus pada satu

wilayah yaitu badan dan dinas Kabupaten magelang, sehingga generalisasi penelitian ini perlu kehati-hatian.

Saran

Memperhatikan beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan sebagai pertimbangan bagi peneliti selanjutnya, antara lain: Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel bebas seperti kualitas SDM dari penelitian Dewi, dkk (2015), karena Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang baik, pemerintah daerah harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas wilayah sampel atau menambah objek penelitian, sehingga dapat diperoleh hasil yang dapat digeneralisasikan.

REFRENSI

- Abdullah, M., Aswati, W. O., & Astrinigita, A. 2017. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Senjangan Anggaran Terhadap Kinerja Pejabat Eselon Iii Dan Iv Pada Dinas Kesehatan Kota Kendari. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(2).
- Asrini, A. 2017. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Skpd Di Pemerintah Daerah Kota Palu. *Katalogis*, 5(1).
- Asrini, P. A., Adiputra, I. M. P., Si, M., Herawati, N. T., & AK, S. 2015. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi (Studi Empiris pada Kantor Kecamatan di Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1)*, 3(1).
- Badan Pemeriksaan Keuangan, 2013. *Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Semester I Tahun 2013*, (Online).
- Bastian, indra, 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Erlangga. Jakarta.
- Becker, S., Green, D. 1962. *Budgeting and Employee Behavior*. *Journal of Business*. 3(14), 392-402.
- Damanik, E. S. 2017. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan, Teknologi Informasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo. *Jurnal of Economics and Business*, 1(1), 51–69.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Yogyakarta: Badan Penerbit BPFE.
- Griffin, Jill 2002. *Customer Loyalty How to Earn It, How to Keep It Kentucky*: McGraw-Hill.
- Halim, A. & Iqbal, M. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- <http://www.bpk.go.id/>
- <http://www.radarjogja.co.id//>
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Istiyani. 2009. Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah di Kabupaten Temanggung. (Tesis).
- Kenis, Izzettin 1979. *Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance*, *The Accounting Review*. 54 (4), 707-721.
- Laoli, V. 2012. *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja dengan Sikap Aparat Pemerintah Daerah sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada*

- Pemerintah Kabupaten Nias*). Tesis. Medan: Program Pascasarjana. Universitas Sumatera Utara.
- Latham, Gary P, dan E. A. Locke. 1990. "A Theory of Goal Setting and Task Performance". *The Academy of Management Review*.
- Magner, N., Welker RB., Campbell, TL. (1996). *Testing a model of cognitive budgetary participation processes in a latent variable structural equations framework*. *Account. Bis. Res.* 27 (1), 41-50.
- Mahsun, M., Sulistiyowati, F., & Purwanurgra, H. A. 2011. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mas'ud, Fuad. 2004. *Survai Diagnosis Organisasional, Konsep, dan Aplikasi*. Semarang: BP Undip.
- Mathis, R. L & J. H. Jackson. 2006. *Human Resurce Management, Alih Bahasa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Matondang, N. I., Basri, H., & Arfan, M. 2015. Pengaruh Sinkronisasi Perencanaan Dan Penganggaran, Partisipasi Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Skpd Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 4(4).
- Mowday, R.T., Steers R.M., Porter, L.W. 1982. *Employee Organization Linkages*:
- Mui Yee, C., Wong Sek Khin, E., Ismail, K. 2016. *An Analysis of Budgetary Goals Impacting Organizational Performance, Audit Financiar*. XIV. 5 (137).
- Mustafa, S., Sutrisno & Rosidi. 2010. Analisis Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan pada SKPD Pemerintah Daerah Kota Kendari. *Jurnal Universitas Haaluoleo, Kendari*.
- Nasir, A & Oktari, R. 2010. *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar)*. <http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JE/article>
- Nurlelahayati, N., & Indriani, M. 2017. Pengaruh Umpan Balik Anggaran, Evaluasi Anggaran Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 134-150.
- Olinda, M. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah (Study Empiris Pada Skpd Kabupaten Indragiri Hulu). *JOM. FEKON*, 2(2).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006*.
- Republik Indonesia, 2004. *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2008. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Jakarta.
- Republik Indonesia, 2008. *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah*. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2014. *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.

- Robbins, Stephen P. 2008. *Perilaku Organisasi. Indonesia: Konsep Kontroversi, Aplikasi, Alih Bahasa: Hidayana Pujatmaka*. Jakarta: Prehalindu.
- Silalahi, S.P. 2012. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah (studi Pemerintahan di Kota Dumai). *Jurnal Ekonomi, Volume 20, Nomor 3, September 2012*.
- Sukmana, W. & Anggarsari, L. 2009. Pengaruh Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (survei pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya). *Jurnal Akuntansi FE Unsil, Vol. 4, No. 1, 2009*.
- Verasvera, F. A. 2016. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Manajemen, 15(2)*, 137–162.
- Wijayanti, W. S., Sjahrudin, H., & Razak, N. 2017. *Pengaruh Karakteristik Individu dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Pegawai*.
- Yuen, Desmond C.Y. 2004. *Goal Characteristic, Communication and Reward Systems, and Managerial Propensity to Create Budgetary Slack. Managerial Auditing Journal. 19 (4)*.